

DOCUMENT

DAMPAK BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP PERKEMBANGAN SO

SCORE

100 of 100

ISSUES FOUND IN THIS TEXT

0

PLAGIARISM

0%

Contextual Spelling

✓ No errors

Grammar

✓ No errors

Punctuation

✓ No errors

Sentence Structure

✓ No errors

Style

✓ No errors

Vocabulary enhancement

✓ No errors

DAMPAK BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP PERKEMBANGAN SO

Basri Bado

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

Jl. Raya Pendidikan, Kampus UNM Gunungsari, Makassar

Email: basribadoT4@gmail.com

Abstrak. Dampak Belanja Pendidikan Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi di Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan : 1) Apakah belanja sektor pendidikan berpengaruh terhadap penurunan jumlah Pengangguran di Sulawesi Selatan?; 2) Apakah belanja sektor pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan daya serap tenaga kerja di Sulawesi Selatan?; 3) Apakah Belanja Sektor Pendidikan dapat mengurangi angka kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Selatan?. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan persamaan panel data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder dengan unit analisis sebanyak 23 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan waktu 10 tahun terakhir (2003-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sektor pendidikan terutama belanja gaji dan belanja operasional berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan selanjutnya berpengaruh untuk menurunkan tingkat pengangguran. Banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan sarnpai Sekolah Dasar (SD) berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. selanjutnya dari keseluruhan variabel dari model persamaan tersebut yang berpengaruh terhadap kemiskinan hanya variabel belanja gaji, penerapan tenaga kerja, pekerja dengan tingkat pendidikan sarjana serta pengangguran.

Kata kunci: Belanja pemerintah, kemiskinan, pengangguran, penerapan tenaga kerja, persamaan simultan.

Daerah yang penduduknya memiliki tingkat pendidikan tinggi seharusnya memiliki kemungkinan mendapat pekerjaan lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk jatuh miskin menjadi rendah. Namun, ada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah walaupun tingkat pendidikan penduduknya rendah. Daerah ini kemungkinan adalah daerah yang memiliki kekayaan SDA bernilai tinggi dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi untuk mengolah kekayaan tersebut. Sebaliknya, ada daerah dengan tingkat pendidikan rata-rata yang tinggi namun justru memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Daerah ini sebenarnya dapat dihitung cukup maju. Namun kemajuan daerah tersebut juga mengundang derasnya urbanisasi.

Kompetisi menjadi semakin ketat dan harga-harga menjadi lebih mahal. Akibatnya akan ada sebagian masyarakat yang tersisih dari kemajuan tersebut, kesulitan untuk mendapat pekerjaan layak, dan kesulitan untuk memenuhi biaya kebutuhan dasar.

Sementara itu, belanja Pemerintah baik pusat maupun daerah sama-sama berperan dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal pengangguran, peran pusat dan daerah kurang lebih terlihat seimbang. Sedangkan dalam hal kemiskinan, tampak bahwa peran pusat lebih besar dari daerah. Hal ini mungkin dapat berarti bahwa anggaran program penanggulangan kemiskinan secara skala lebih besar di tingkat Pemerintah Pusat dibanding Pemerintah Daerah. Kemungkinan lainnya, program penanggulangan kemiskinan di daerah belum memiliki tingkat efektifitas seperti program yang dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat. Secara kumulatif, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah terlihat lebih berpengaruh terhadap kemiskinan daripada pengangguran. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan fokus Pemerintah secara keseluruhan yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dibanding

Pengangguran.

Teori pertumbuhan ekonomi Solow (Romer; 1996)' memasukkan faktor manusia sebagai faktor produksi, disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori Solow tersebut menggaris bawahi bahwa secara tidak langsung kemampuan produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh akses manusia untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian kebijakan pemerintah seharusnya mengarah dan fokus terhadap penyediaan layanan pendidikan yang maksimal dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Prioritas pengeluaran pemerintah dalam pembangunan manusia sektor pendidikan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengelolaan layanan publik (pendidikan) yang tidak lagi berfokus pada sekedar input (terutama anggaran) ataupun output, tetapi lebih berorientasi pada hasil (outcome). Dengan demikian, keberhasilan pendidikan bukan lagi diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dikucurkan (dimensi input) dan berapa banyak sekolah yang telah didirikan (dimensi output). tetapi diukur dari dimensi outcomenya yakni seberapa besar hasil dari layanan pendidikan tersebut dapat terserap ke pasar kerja dengan tingkat pendidikan yang telah dicapainya (Basri, 2016). Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama 5 (lima) tahun terakhir dalam Basri (2016) disebutkan bahwa penduduk usia kerja (PUK) di Sulawesi Selatan tercatat mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 5.559.748 orang pada tahun 2008, meningkat pada tahun 2009 menjadi 5.660.624 orang, pada tahun 2010 menurun menjadi 5.567.601 orang, meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 5.616.709 orang dan pada tahun 2012j uga meningkat 5.667.985 orang. Hal ini diduga akibat perubahan faktor-faktor seperti fertilitas, moralitas

yang relatif masih cukup tinggi. angka angkatan kerja pada periode yang juga hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah Angkatan sebesar 3.447.879 orang dan pada tahun 2009 menjadi 3.536.920 orang, tahun 2010 meningkat lagi menjadi 3.571.317 orang dan tahun 2011 sebesar 3.612.424 orang namun pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan menjadi 3.560.891 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, angkatan kerja di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan maksimum sekolah dasar dimana pada tahun 2008 sebesar 1.760.891 orang atau 51,07 persen, 1.767.856 orang atau 49,98 persen pada tahun 2009 dan 1.787.625 orang atau 50,06 persen pada tahun 2010, dan 1.757.138 orang atau 48,64 persen pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 sebesar 1.665.050 orang atau 46,76 persen. Di samping kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya, Hal tersebut juga berdampak pada peningkatan pada persentase pengangguran terbuka berdasarkan jenjang pendidikan yaitu: tingkat pendidikan jenjang SD sebesar 32,80%, SMP 7,52%, SMA sederajat 36,08%, Diploma sebesar 1,67 dan Perguruan Tinggi S1 sebesar 11,94%.. (PPDA, 2012). Sejak pertengahan tahun 1990-an, Indonesia telah mengalami kenaikan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Kondisi tersebut terdapat pengecualian yang telah terjadi, yaitu penurunan yang sifatnya sementara pada masa krisis ekonomi 1996-1997 dan penurunan pada tahun 2004-2005. Penurunan pengeluaran pada tahun 2004-2005 disebabkan oleh pelaksanaan anggaran yang rendah dan bergesernya anggaran di semua sektor sosial akibat kenaikan subsidi BBM. Pengeluaran untuk sektor pendidikan di tingkat nasional mencapai puncaknya pada 2003, ketika pengeluaran pendidikan mencapai sekitar 16

persen dari seluruh pengeluaran di tingkat nasional. Pada tahun 2004, total pengeluaran nasional meningkat sekitar 4 persen. Akan tetapi, proporsi pengeluaran untuk sektor pendidikan menurun menjadi sekitar 14 persen. Pengeluaran untuk sektor pendidikan sebagai proporsi dari PDB juga menurun pada tahun 2004 jika dibandingkan dengan pengeluaran pada tahun 2003. dari sekitar 3.2 persen meningkat sekitar 2.8 persen. sebagaimana proporsi pengeluaran secara keseluruhan di tingkat nasional terhadap PDB yang telah turun dari 19.8 persen menjadi 19.6 persen (Hasil Kajian Pengeluaran Sektor Publik, World Bank 2013). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki proporsi belanja untuk sektor pendidikan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan belanja sektor pendidikan di Sulawesi Selatan tersebut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kebijakan politik pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan menjadi salah satu faktor pendukung dalam merealisasikan kenaikan anggaran sektor pendidikan tersebut. Secara riil, proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Sulawesi Selatan telah mencapai di atas 20 persen dengan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai pada tahun 2010, proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah mencapai 31 persen, padahal tahun 2005 baru mencapai 21 persen. Belanja sektor pendidikan yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah terus membesar. Pada tahun 2005, total belanja riil sektor pendidikan sebesar Rp. 1,7 triliun dan meningkat menjadi Rp. 5 triliun pada tahun 2011. Belanja pendidikan kabupaten/kota

berkontribusi besar bagi peningkatan total belanja pendidikan di Sulawesi Selatan. Secara riil, belanja pendidikan kabupaten/kota meningkat rata-rata 34 persen pertahun, sedangkan belanja pendidikan pada tingkat provinsi hanya meningkat 5 persen per tahun.

Melihat perkembangan belanja pemerintah sektor pendidikan berdasarkan data mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Porsi Belanja sektor pendidikan telah sesuai bahkan melebihi dari amanat UUD 1945 yakni 20%o dari total APBN di luar gaji pendidik dan tenaga pendidikan. Namun perkembangan jumlah belanja sektor pendidikan tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa persentase jumlah pengangguran masih relative cukup tinggi dan mengakibatkan angka kemiskinan juga masih relatif tinggi.

METODE PENELITIAN

Faktor pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah bentuk permodelan ekonometrika dengan menggunakan persamaan simultan. Model persamaan simultan digunakan karena hubungan variabel tidak hanya bersifat satu arah namun bersifat saling mempengaruhi (dua arah). Dalam permodelan tersebut digunakan data sekunder dengan bentuk panel data (pooled data) yang merupakan kombinasi data runtun waktu (time series) dan data silang tempat (cross section). Untuk estimasi data empiris setiap variabel diolah dengan menggunakan Microsoft excel estimasi hubungan antara variabel diolah dengan SPSS versi 20.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 21 kabupaten dari 24 kabupaten/kota. dengan waktu selama 10 tahun (2004-2013). Pengambilan waktu 10 tahun (2004-

2013) dengan pertimbangan selama rentan waktu tersebut adalah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan tentang belanja operasional sekolah (BOS) pada sektor pendidikan. Oleh karena itu sampel penelitian ini sebanyak 23 kabupaten dengan waktu pengamatan selama 10 tahun.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan melakukan pendekatan mengestimasi model pengeluaran pemerintah. Model outcome layanan pendidikan,

dan model serapan tenaga kerja serta model variabel sosial ekonomi menggunakan data panel (pooled data). Yaitu gabungan antara data lintas waktu (time-series data) dan lintas ruang (cross-section data) 23 daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2004- 2013.

Bentuk penulisan terhadap hipotesis yang diajukan diuraikan menggunakan SPSS Versi 20. Metode analisis yang digunakan adalah analisis

kuantitatif dengan melakukan pendekatan mengestimasi model pengeluaran pemerintah, model outcome layanan pendidikan, dan model serapan tenaga kerja serta model variabel sosial ekonomi menggunakan data panel (pooled data), hubungan antara data lintas waktu (time-series data) dan lintas ruang (cross-section data).

Analisis Model Data

Model regresi panel data yaitu kombinasi runtun waktu (time series) dan data silang (cross-section). Data runtun waktu meliputi satu tetapi meliputi beberapa waktu. dan data

terdiri atas beberapa objek atau variabel (Winarno, 2009:91)

Panel data mempunyai keuntungan: dapat memberikan informasi lebih banyak variabilitas, memperkecil korelasi antara variabel lebih banyak atau bebas, serta lebih efisien. Analisis panel dalam penelitian menggunakan pendekatan Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 2009:91). Menurut Widarjono (2013: ss), dimana dalam pendekatan tersebut menggunakan teknik mengestimasi

panel data hanla dengan mengkombinasikan daa time series dan cross section tanPa melihat perbedaan waktu dan individu dan menggunakan OLS (Ordinary Least Square).

b). Persamaan Simultan

Selain estimasi model dengan menggunakan persamaan tunggal, dengan membandingkan estimasi model pendekatan dilihat dari berbagai sudut pandang. maka ada alternatif lain yaitu pendekatan simultan. Model persamaan simultan dimana ada lebih dari satu persamaan regresi dan masing-masing per-samaan regresi dan masing-masing persamaan memiliki variabel yang saling tergantung.

Persamaan I :

$$PTKi: 0o + p1B.Caji,, + p, BBJ\&MODAL,, + p3B.oPS,, + p4 RLS + p5 TS + po SD + pu SMP + pt SMA+0,SARJANA+ e7,r III.1$$

Persamaan II :

$$Unemployu = pr0 + 0r rRLS,(+ pi2TS,, + p13SD,1 + pr4SMPir+ pr5SMAir+ pr65ARJANA,r + pr7PTK1, + e8n III.2$$

Persamaan III :

$$Pov* = p,, + p1eVW,, + pz6Unemploy,, + p11B.Gaji1, + p2'BBJ\&MODAL,' + pnB.oPS,' + pr4RLS,, + p25TS,, + p26SD,, + p27SMP,r+ p28sMA"+ pzqSARJANA,, + P3oPTK;'+$$

Keterangan :

B(t = tt(IJlrjr (ia.ji

BBj&M tsctarriJ baralr8. Jasa dur nlodal

Bops = llelxnja Opcrasional

PTK = I'cn)eraPunlenaSa Kerja

Unemplol'= Tingkat Pengangguran

RLS = Rata-Rata Lama S€kolah

VW = Tingkat Ketimpangan (Pendekatan Uatson) Poven)

= Tingkat Kemiskinan

TS = Tingkat Pendidikan pekerja tidak Sekolah

PSD = Tingkat Pendidikan pekerja Sekolah Dasar PSMP :

Tingkat Pendidikan pekerja SMP PSMU = Tingkat

pendidikan pekerja SMU PSARJANA = Tingkat

pendidikan pekerja PT

it = tahun dan region

$\epsilon_{i,t}$ = error term 1.2- 10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran hasil estimasi dapat dilihat

dari nilai koefisien estimasi

model persamaan VI pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Model Kemiskinan

Keterangan:

*) Signifikan pada taraf signifikansi 0.01 atau 99%

*t) Signifikan pada taraf signifikansi 0.05 atau 95%

***) Signifikan pada taraf signifikansi 0.10 atau 90%

ns) = non-signifikan

Nilai estimasi pada tabel 4.27 dapat dimasukkan

kedalam persamaan regresi berikut ini:

Model Persamaan VI

Poverty_{it} = -3,515 + 0,040B.caji_{it} + 0,021

BBJ&MODAL_{it} + 0,017B.OPS_{it} +

T_{it} = (2,844) (1,660) (1,341) 0,055RLS_{it},

+ 0,025TS_{it} + 0,022SD_{it} + 0,038sMPi_{it} + 0,010sMA_{it} -

r_{it} = (0,522) (-1,6s7) (-0.e57) (-1,242\

(0,489) 0,01I SARJANA_{it} + 0,181PTK_{it} +

0,0 t I Unemploy_{it} - 0,002Vw_{it}

T_{it} = (2,522) (7:1581 (5.845) (4,I18)

R: 0.462 Adj Rr - 0.433 sE - 0.09?6 Dw-

Stat= 1,481

Secara empirik kemiskinan pada 23 daerah Sulawesi Selatan selama tahun 2004-2013 beberapa kabupaten/liota mengalami penurunan bahkan porsentase penurunannya rata-rata 1Yo-3Yo pertahun, bahkan kota Makassar tingkat penurunan angka kemiskinannya mencapai rata-rata sebesar 7% pertahun. Secara keseluruhan provinsi Sulawesi Selatan penurunan tingkat kemiskinannya rata-rata mencapai 2,3 % tahun. Bila dikaitkan dengan belanja pemerintah sektor pendidikan yang mengalami pertumbuhan rata-rata 8%-10% pertahun, dimana dalam belanja pemerintah sektor pendidikan tersebut diantar-nya belanja gaji, belanja barang jasa dan modal serta belanja operasional. Namun setelah dilakukan uji hipotesis hanya belanja gaji yang berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan menurunnya tingkat kemiskinan

SIMPULAN

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh untuk menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan rata-rata lama sekolah mempengaruhi kenaikan angka pengangguran demikian juga menurunnya jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan tidak sekolah (TS). Sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berpotensi mempengaruhi naiknya jumlah pengangguran. Banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya dari keseluruhan variabel dari model persamaan tersebut yang berpengaruh terhadap kemiskinan hanya variabel belanja gaji. penyerapan tenaga kerja, pekerja dengan tingkat

pendidikan sarjana serta pengangguran

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, 2009. *Illeduksi Keniskinin: Sehtoh*
Proposul Bartt unluk Indonesia. Nala Cipta
Litera dan PSKM UNHAS. Makassar
- . 2007. *Peran Anggarun Penerinl1h*
-lirhorlop
Pengurangan Angka Kemiskinan di
Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10 No. 1.
- Afzal et.al. 2002. *Relationship among Etlucation,*
Pover4' arul Economic Grou'th in Pakiston:
An Econometric ,4aaltsls. JOURNAL of Elementary
Education. Vol.22, No. I pp.23-45
- Alam, Syamsul, 2014, *Anulisis Pengeluarun*
Pemerintah Bidang Pendidikan dan Dampak'
rya Terhadap Kemiskinan di Sula'lesi
Selaton. Thesis Universitas Hasanuddin
(Unhas)
- Amir Archam, 201 3 *Danpa| Kebijakan*
Desentrqlisqsi Fiskal Terhadap Pergeseran
Sectoral, dan Pola KetimpanSon Anlar
Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa
(lot l)). Disertasi Bandung pascasarjana
Unpad-
- Anwar Sanusi, 1998. *Pengaruh Alokasi Sumber Danq*
terhadap Perubahan Struktur Produksi dan
Distribusi PendaPaldn Antar daerah di
Indonesiq. Disertasi. Bandung Pascasarjana
Unpad.
- Basri dkk (2015). "Analysis of the influence of Average
Length of School and Education Level of
workers against Poverf,' in South Sulawesi."
international Journal of Applied Business and
Economic Research (IJABER) Vol.13, Issue
2 p 55 1-559
- Baltagi. Badi H.2001. *Econometric Analysis of Panel*

Data, England. John Wiley & Sons.

Bappenas. 2012. Pembangunan Daerah dan Kota
Angka 2012. Kementerian Perencanaan
Nasional.

Becker Gary 5., Investment in Human Capital: A
Theoretical Analysis. The Journal of Political
Economy, Volume 70, Issue 5, Part 2 :
Investment in Human Being (oct., 1962).949.

Barr. Nicholas. 2002. "The Benefit of Education
What We Know' and that We Don't. London
School of Economics.

Budiono. 1992. Teori Perilaku dan Ekonomi. Yogyakarta.
BPFE

Boediono 2009. Ekonomi Indonesia. Mau ke Mana:
Kumpulan Esai Ekonomi- Jakarta: Penerbit
Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Danacica, et.al (2010). The introduction of
Tehran higher education and economic
growth in Romania. international Review of
Business Research Paper. 4(6), 491 - 500.

Datt, G. and M. Ravallion (1992) 'Growth and
Redistribution Components of Changes in

Musgrave. Richard A.. and Peggy B Musgrave -
(1989). Public Finance in Theory and Practice'
5th EDT.

Muehal. Waris Hameed' 200? Human Capital
' Investment, and Poverty Reduction Strategy'
Pakistan. Asia Pacific Press'

Parwoto, 2001. Masalah Penanggulangan Ke-
miskinan (Unpublished)' Departemen Perumahan
dan Pembangunan Sarana Wilayah'
Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48
tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan'
Widvastuti, Astriana. 2012, Analisis Hubungan
Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan
Pekerja Terhadap Kesejahteraan
Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009'
Economics Development Analysis Journal [http://
journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj)
Uzuchukow imakom, Vol.5 No 12 Desember 2010'
Distributional Impact of Public Expenditure on
Education and Healthcare in Nigeria: A
Gender Based Welfare Dominance Analysis'
International Journal of Business and
Management